



Disensus: Politik Para Penulis dalam Antologi Puisi *Bima Membara*

Naila Fauziah

STKIP Taman Siswa Bima

Correspondence: nailafauziah0515@gmail.com

Artikel Info

Abstrak

Submission

2025-03-16

Revisions

2025-03-22

Publish

2025-03-28

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya disensus dalam politik para penulis terhadap konflik pembangunan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam antologi puisi *Bima Membara*. Upaya disensus dalam politik diuraikan menggunakan teori disensus Jacques Rancière dengan pendekatan pragmatik dan kualitatif sebagai metode penelitiannya. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai praktik tatanan sensori alamiah yang menjejer individu-individu dan kelompok untuk menempati posisi sebagai yang memerintah dan diperintah. Kelompok itu tergambarkan dari aparat pemerintah, penguasa dan masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa para penulis melalui puisi-puisinya, merespon konflik yang terjadi di Bima. Para penulis secara gamblang menyuarakan dan mengecam atas tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian dan Brimob pada 24 Desember 2011. Kurangnya respon pemerintah terhadap tuntutan massa, yakni untuk mencabut SK 188, sebagai surat izin pembangunan pertambangan. Tuntutan yang tidak diindahkan, kemarahan atas ditahannya rekan seperjuangan, insiden di Pelabuhan Sape yang melukai sebagian besar aksi massa dan menewaskan dua orang. Pada puncaknya, masyarakat membakar kantor kabupaten Bima pada 26 Januari 2012. Kejadian-kejadian tersebut, kemudian secara eksplisit dituangkan dalam antologi puisi *Bima Membara*.

Kata Kunci: Disensus Jacques Rancière; Antologi Puisi; *Bima Membara*

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan sastra di Indonesia, menjadi isu yang akan terus diperhatikan. Contohnya keadaan selepas merdeka, memperlihatkan bahwa sastrawan masa itu mulai memunculkan tema-tema yang beragam dalam karya sastra yang diproduksinya. Pada saat itu, sastrawan Indonesia menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah sebagai tema yang diangkat. Sejalan dengan itu, Ajip Rosidi dalam (Mahayana, 2016) menawarkan sebuah gagasan kedaerahan dalam keindonesiaan yang sesungguhnya. Ajip Rosidi mencoba menempakan posisi sastrawan diberbagai daerah sebagai bagian penting dalam peta kesusastraan Indonesia. Pada dua puluh tahun terakhir, peta sastra Indonesia nampaknya mulai berubah, dimulai dari munculnya berbagai Koran, yang menyediakan ruang sastra dalam rubriknya, seperti Jawa Pos, Mataram, Bali dan berbagai Koran daerah lain. Hal ini membuka peluang bagi sastrawan diberbagai daerah dapat mengisi ruang yang telah disediakan. Adanya otonomi daerah berpengaruh positif dalam menunjukkan eksistensi wilayah, melalui karya sastra. Sastra kedaerahan ini dapat dijadikan sebagai usaha pendokumentasian dalam peristiwa yang terjadi di daerah. Selain itu, banyak penulis dan seniman yang mendapatkan inspirasi dari cerita atau simbol-simbol dalam sastra daerah untuk menciptakan karya kontemporer (Damono, 2002). Salah satu daerah, yang menjadikan peristiwa lokal, sebagai isu dalam terbitnya sebuah karya sastra adalah Bima.

Pada saat ini sastra yang ada di Bima masih ada meskipun kenyataan yang terjadi, sastra kurang mendapat perhatian. Perkembangan sastra daerah kian lama, kian berkurang. Kurangnya pakar sastra daerah yang semakin langka, disamping dokumen sastra (Hasnun, 2020). Padahal, sastra di Bima beragam adanya, baik dalam bentuk puisi dan juga prosa. Kenyataannya, pemerintah belum memberikan atensi terhadap perpuisian di daerah Bima. Bagi penulis Bima, karya sastra merupakan bentuk ungkapan perasaan dan peristiwa yang

terjadi di sekitar. Sejalan dengan yang diuraikan oleh Wellek&Warren (2016), bahwa sastra menyajikan kehidupan, dan kehidupan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra meniru alam dan dunia subyektif manusia. Olehnya, atas inisiasi beberapa orang yang masih peduli dan melihat ada peristiwa yang mengemparkan di Bima dan harus didokumentasikan dalam sebuah karya sastra. Dalam hal ini yaitu antologi puisi *Bima Membara* yang hadir disebabkan sebuah peristiwa.

Peristiwa ini diawali oleh keputusan Bupati Bima pada tahun 2012 yang memberikan izin terhadap PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Masyarakat merasa, kegiatan eksplorasi oleh perusahaan tambang akan mengganggu kehidupan masyarakat, terlebih bagi lingkungannya. Masyarakat di Kecamatan Lambu sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan dan juga peternak. Adanya perusahaan itu akan menguasai sumber daya alam yang ada diwilayahnya. Hal itu yang membuat munculnya keresahan masyarakat. Masyarakat mengecam tindakan pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi lebih dini, sehingga masyarakat tidak terkejut ketika mendapati adanya aktivitas pembangunan pertambangan di wilayah mereka. Faktanya, pemerintah desa memalsukan tanda tangan masyarakat yang kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada Bupati.

Masyarakat merasa ada kepentingan politis ataupun pribadi bagi penguasa untuk meraup keuntungan dari kerja sama yang mereka sepakati. Masyarakat mencoba, mengeluarkan aspirasinya dalam bentuk aksi. Tuntutannya tidak diindahkan, hingga berujung tewasnya dua orang aksi massa di Pelabuhan Sape dan pembakaran kantor kecamatan Lambu, kantor Bupati Bima serta kantor KPU Kabupaten Bima pada saat itu. Tindakan dan kejadian itu yang menarik untuk diteliti melalui antologi puisi *Bima Membara* sebagai objek materialnya. Sebagaimana, Alrasyid (2012) menyampaikan bahwa puisi tersebut menjadi alternatif celoteh bagi ide yang tidak bisa dipenjara waktu, walaupun badan terkekang, puisi tetap dapat berkicau di tengah tirani dan denting peluru. Buku kumpulan puisi *Bima Membara* merupakan gerhana realitas sekaligus gerhana waktu, lahir dari refleksi sadar para penulisnya, karena sebagai sikap dan sekaligus kenangan atas peristiwa bahwa Bima memanglah membara (Alrasyd, 2012). Penelitian ini diharapkan mampu menguraikan mengenai bagaimana para penulis merespon politik atas konflik yang terjadi di Bima melalui antologi puisi *Bima Membara* dengan menggunakan teori Disensus politik Jacques Rancière.

Peneliti menguraikan antologi puisi *Bima Membara* dengan memanfaatkan konsep pemikiran Rancière, terutama pada politik dalam disensus. Secara umum, politik (atau *the police*) dipahami sebagai praktik kekuasaan yang melibatkan kehendak serta kepentingan yang memunculkan pembelahan dan hierarki di dalam ruang hidup bersama. Politik membentuk partisipasi melalui beragam persepsi dan tindakan yang menciptakan struktur ruang sosial bersama (disebut *le partage du sensible*) (Rancière, 2016). Dalam pengertian luas, politik menjadi cara untuk menyusun keterhubungan antara berbagai pengalaman indrawi, seperti berbicara, mendengar, dan melihat atau bahkan menyembunyikan berbagai data dan pola hidup, sehingga terbentuk hierarki dan kategori sosial tertentu. Di sini, politik dipahami sebagai mekanisme dalam tatanan sensorik yang mengatur posisi individu dan kelompok sebagai penguasa atau yang dikuasai (Rancière, 2010). Politik juga menyusun dimensi ruang, waktu, hukum, dan ekonomi yang khas. Rancière menyebut proses ini sebagai rezim partisi, yaitu tatanan hukum dalam praktik *police* yang menentukan siapa yang diakui sebagai bagian dari komunitas, dan siapa yang dikecualikan (Rancière, 2016).

Yang-politis merupakan bentuk intervensi terhadap tatanan politik yang mapan (*police*), dengan tujuan membuka ruang bagi mereka yang sebelumnya disingkirkan agar dapat terlihat dan diakui keberadaannya (Rancière, 2016). Dalam konteks ini, yang-politis menunjukkan potensi-potensi baru dengan landasan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, maka pada dasarnya semua manusia memiliki kesetaraan (Robert, 2011). Sejalan dengan itu, adanya dasar pembeda antara 'politik' dan 'yang-politis' ini, Rancière menjelaskan makna dari disensus.

Disensus merupakan jurang atau ketegangan yang tak dapat didamaikan antara politik dalam arti tatanan yang mapan dan yang-politis sebagai bentuk gangguannya. Ia merepresentasikan konflik antara cara-cara melihat, merasakan, dan memahami realitas yakni benturan antar rezim sensoris. Disensus berfungsi sebagai cara untuk menggoyahkan praktik politik yang sudah rutin, membuka lapisan-lapisan pembagian yang tersembunyi, serta mengungkap realitas yang selama ini tertutupi. Menurut Rancière, inti dari yang-politis justru terletak pada disensus itu sendiri, yakni saat dua dunia hadir secara bersamaan dalam satu kesatuan yang tegang dan tak terselesaikan (Rancière, 2010). Maksud dari pernyataan tersebut adanya dunia nyata dan dunia yang disembunyikan, seperti dunia yang memproduksi partisi- partisi sosial. Dalam dunia yang terpecah oleh

partisi- partisi ini, muncullah korbannya. Korban yakni, mereka yang dianggap sebagai ‘bagian tapi bukan bagian’. Mereka bagian dari masyarakat, sekaligus bukan bagian karena partisi yang mengeksklusikan dirinya.

Dalam konteks ini, muncul istilah sensibilitas disensual, yang merujuk pada kemampuan untuk membantu orang memahami dan mengalami dunia lain yang nyata, dengan cara menyingkap hal-hal yang selama ini tersembunyi oleh norma-norma yang berlaku (Rancière, 2010). Bagi Rancière, kesetaraan bukan sekadar tujuan akhir dari praktik politik, melainkan prinsip dasar atau aksioma dari yang-politis itu sendiri. Dengan demikian, kesetaraan tidak dipahami sebagai suatu cita-cita ideal yang terkait dengan isu atau substansi tertentu, melainkan sebagai dasar pijakan dalam tindakan politik (Robert, 2011). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Rancière, politik harus didefinisikan atas dirinya sendiri, tanpa bergantung pada kekuasaan atau ditentukan oleh entitas lain. Ia menolak pandangan bahwa politik semata-mata adalah upaya mempertahankan atau merebut kekuasaan. Sebaliknya, politik dipahami sebagai suatu cara bertindak yang dijalankan oleh subjek-subjek tertentu, yang didasarkan pada rasionalitas dan penalaran yang khas. Selain itu, disensus berarti sebuah tindakan yang dilakukan atas ketidaksetujuan subjek dari suatu hal, yang dalam hal ini mengenai ketidaksetaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik, yang memberikan perhatian utama terhadap pembaca. Pendekatan ini digunakan karena paradigma dari pembacaan disensus Jacques Rancière berkenaan dengan cara pembacaan yang tidak hanya melihat antologi puisi *Bima Membara* sebagai produk karya semata, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam terciptanya karya tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yakni suatu langkah-langkah yang memanfaatkan penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi (Faruk, 2017). Dalam penelitian ini, data yang digunakan berbentuk deskriptif, yang ditafsirkan dari kata, larik, hingga narasi dalam bait yang bersumber dari antologi puisi *Bima Membara*. Beserta data yang berada di luar karya sastra, meliputi artikel dan berita yang berkaitan dengan konteks masyarakat Bima, berkaitan dengan permasalahan pertambangan, pada akhir 2011–2012. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasar makna, kontestasi makna dari bait puisi tersebut. Diakhiri dengan analisis data, dengan tujuan mendapatkan adanya hubungan antara data dengan data yang telah diklasifikasikan. Olehnya, dapat diketahui respon para penulis, menulis puisi yang diilhami dari konflik di Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Politik Para Penulis terhadap Konflik Masyarakat dengan Aparat Pemerintah

Dalam antologi puisi *Bima Membara* yang terbit sebagai respon dalam permasalahan konflik di kecamatan Lambu kabupaten Bima pada tahun 2011 hingga 2012. Dalam antologi puisi ini, diuraikan mengenai pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang menyetujui adanya PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk menguasai sumber daya alamnya. Aksi penolakan masyarakat direspon oleh tindakan represif aparat pemerintah. Kejadian ini, dinarasikan dalam sebuah puisi oleh Dinullah Rayes.

Dinullah Rayes

Menimba Air Mata di Bima

Sabtu kelabu, dua empat Desember dua ribu sebelas Anak-anak tradisi berteriak-teriak bebas

Dari Sape–Bima mengacungkan genggam tangan ikhlas Cabut ijin bupati tambang emas mengemas birokrat hulu. Melalui selebar kertas bernomor 188 dua ribu sepuluh

Perusak, pencemar lingkungan hidup damai menyemai Yang hijau daun, cairan bening mengila

Tinggalan, warisan para pendahulu.

Duh Tuhan maha indah permai

Ke mana lagi kami mengadu kalau nasib kami terbantai Kaki-kaki telanjang lengan berdebu dirantai-rantai Tiba-tiba peluru aparat keamanan sang polisi

Pada mulanya merobek jaringan udara

Kemudian moncong senapan diarahkan dada pemuda desa Dua insan muda usia roboh berlumut darah

Beberapa tubuh tersungkr mengucur darah segar Hujan air matapun mengguyur kota dan desa di Bima
Cuaca, wacana kelabu ini seakan suara, warna hati aparaturnya Rakyat diseret ke selokan nasib comberan kotor

Hari ini di tanah republik Indonesia tercinta ini Rakyat cuma bersenjata polos, ikhlas tinggal pasrah

Tiada banyak mengharap pada partai dan penguasa pilihannya Sebab pengenggaman kapital, penimbun materi baja Bersembunyi dibalik ketiak aparaturnya yang luntur

Cita-cita dan cinta tanah tumpah darah (Raya, 2012).

Pada bait pertama, Dinullah Raya secara eksplisit menerangkan mengenai keadaan "*Sabtu kelabu, dua empat Desember dua ribu sebelas, Cabut ijin bupati tambang emas mengemas birokrat hulu/ Melalui selembur kertas bernomor 188 dua ribu sepuluh/ Perusak, pencemar lingkungan hidup damai menyemai*". Bait ini merespon, dari adanya aksi yang disebabkan oleh penolakan masyarakat atas kegiatan eksplorasi. Kegiatan itu berdasarkan surat izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, melalui SK No, 1888.45/357/004/2010. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui ataupun mendapat sosialisasi mengenai SK 188 tersebut (Devita, 2012).

Pada saat pihak pertambangan mulai melakukan aktifitas pembangunan, ketika itu masyarakat baru mengetahuinya. Pada bait terakhir, Dinullah Raya menyuarakan "*Rakyat cuma bersenjata polos, ikhlas tinggal pasrah/ Tiada banyak mengharap pada partai dan penguasa pilihannya/ Sebab pengenggaman kapital, penimbun materi baja/ Bersembunyi dibalik ketiak aparaturnya yang luntur/ Cita-cita dan cinta tanah tumpah darah*". Bait tersebut menggambarkan keadaan masyarakat yang mencoba untuk menyuarakan. Aksi masyarakat tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah, karena massa aksi waktu pertama turun hanya dilakukan oleh beberapa pemuda saja. Masyarakat tidak tinggal diam, mereka mengumpulkan anggota untuk melakukan aksinya kembali. Hal ini sejalan dengan pernyataan Robert (2011) bahwa yang-politis menunjukkan potensi-potensi baru dengan landasan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, maka pada dasarnya semua manusia memiliki kesetaraan. Pemuda tidak hanya menunggu, namun mereka berpikir kritis dan memiliki keberanian untuk menyampaikan argumen pada penguasa.

Puisi yang ditulis oleh Zeta Rosa memperlihatkan hak masyarakat yang sudah dirampas oleh penguasa. Penguasa yang memiliki andil penuh dalam mengambil keputusan. Pada kerangka teori Rancière (2011) menyebut istilah rezim partisi, di mana hukum dalam praktik *police* memisahkan mereka-mereka yang dianggap sebagai bagian, dan mereka yang dianggap bukan bagian dari komunitas. Dalam hal ini, masyarakat yang harusnya berada dalam bagian mengetahui adanya pembangunan di daerah mereka, namun tersisihkan oleh penguasa.

Zeta Rosa

Negeriku di Serambi Bima

Negeriku dijajah pemodal asing? Di sana berkalang limbah

Perkilangan emas makin menggarang Tanah subur menjadi tanah kering beracun Memusnahkan panen rakyat

Memusnahkan kehidupan rakyat Lihatlah, adik mati bersarang peluru

Ayah pun mati terkapar tak berdaya mencari kesejahteraan hidupnya Bekerja untuk tanah sawah dan ladang

Tanah kehidupannya dirampas

Kemudian mereka mati dibronjong senapan aparat negeri yang mengantongi dollar berdarah

Dan memilih sebagai budak bayaran (Rosa, 2012).

Zeta Rosa, pada empat larik terakhir "*Tanah kehidupannya dirampas/ Kemudian mereka mati dibronjong*

senapan aparat negeri yang mengantongi dollar berdarah/ Dan memilih sebagai budak bayaran. Demi menyejahterakan pribadi penguasa, guna merauk untung baginya. Fakta yang terjadi, pemerintah Desa juga bermain di sini, karena mereka yang menandatangani persetujuan masyarakat sekaligus *fotocopy* KTP. Sementara, masyarakat umum tidak mengetahuinya. Peristiwa tersebut direspon pula oleh Heri Latif, dalam puisi yang berjudul “Emas Berdarah Rakyat”.

Heri Latief

Emas Berdarah Rakyat

Kejamnya pemerintah menembaki rakyat Buat apa kita punya hak asasi manusia Rakyat merayap di jurang perbedaan sosial Pemodal merajalela merampas hak rakyat Rakyat diusir paksa dari tanah pusaka

Demi tambang emas rakyat bersimbah darah Terkutuklah rezim pembantai rakyat

Seruan buat semua yang anti penindasan Stop pembantaian rakyat Indonesia

Kobarkan *Bima Membara* rakyat melawan (Latief, 2012).

Melanjutkan analisis pada puisi yang pertama, bahwa masyarakat kembali menyuarakan aspirasinya, mereka menghimpun massa dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti yang disuarakan oleh Heri Latif pada bait terakhir “*Demi tambang emas rakyat bersimbah darah/ Terkutuklah rezim pembantai rakyat/ Seruan buat semua yang anti penindasan/ Stop pembantaian rakyat Indonesia/ Kobarkan Bima Membara rakyat melawan*”. Larik-larik yang dituangkan oleh Heri Latif sejalan dengan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Di depan Kantor Camat Lambu pada Februari 2011, masyarakat meminta Camat untuk mendatangkan Bupati, guna memberikan penjelasan terkait SK 188 tersebut (Devita, 2012). Pada saat itu, Bupati tidak datang dengan alasan sedang ke Mataram. Masyarakat tidak puas dengan alasan yang diberikan, hal ini menyebabkan peristiwa, pembakaran kantor Camat Lambu beserta satu rumah dinas dan satu unit pemadam kebakaran. Insiden itu membuat beberapa anggota massa, ditahan oleh kepolisian. Adanya penahanan terhadap beberapa anggota, membuat masyarakat melakukan aksi di depan Kantor Kabupaten Bima. Mereka meminta, rekannya untuk dibebaskan, dan SK 188 tersebut dicabut, tetap saja aspirasinya tidak diindahkan.

Sementara itu, masyarakat tetap berupaya meminta pemerintah kabupaten Bima, untuk menyetujui tuntutan dalam aksi tersebut. Melalui puisinya, Habe Arifin memberikan kata-kata penyemangat untuk masyarakat.

Habe Arifin

Untuk Petani Bima

Ketika senapan bicara dan kau sudah dihujani tembakan Ketika sepatu lars bersuara dan kau dibungkam

Ketika kekerasan menjadi kebijakan dan kau ditangkap Ketika kekejaman menjadi tuhan dan kau disiksa

Ketika kebiadaban menjadi agama dan kau disikat, dilibas Katakana: tidak pada mereka

Katakan: Tidak pada neraka (Arifin, 2012).

Habe Arifin memperlihatkan bahwa masyarakat dengan petani sebagai mata pencaharian, harus berani mengambil sikap melawan. Masyarakat Lambu, sebagian besar memang bekerja sebagai petani dan peternak. Masyarakat merasa tidak tenang, ketika melihat aktifitas pihak penambang. Hal ini disebabkan kekhawatiran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan apabila tambang itu tetap dibangun. Olehnya, masyarakat tetap melakukan aksi. Sementara insiden pembakaran kantor Lambu yang mengakibatkan penahanan terhadap rekan. Masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) sudah melakukan aksi berkali-kali, namun tetap tidak ada respon baik dari pemerintah.

Hal ini membuat masyarakat, akhirnya memblokir pelabuhan Sape. Tindakan ini mendapat respon dari pemerintah, sehingga pemerintah melakukan negosiasi. Kenyataannya, pemerintah hanya mengeluarkan putusan untuk menghentikan sementara izin pembangunan tambang selama satu tahun. Sementara, masyarakat menghendaki pencabutan izin pembangunan tersebut. Pemerintah tetap tidak mencabut izin, hal itu membangkitkan kemarahan masyarakat. Hal inii sejalan dengan pernyataan Rancière (2010) yang menyebut istilah rezim partisi, di mana hukum dalam praktik *police* memisahkan mereka-mereka yang dianggap

sebagai bagian, dan mereka yang dianggap bukan bagian dari komunitas. Pada akhirnya, masyarakat yang sukar dikontrol dalam aksi 24 Desember 2011, membuat aparat Kepolisian dan juga Brimob melakukan tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan aparat, menyebabkan massa mengalami luka karena terkena tembakan hingga dua orang meninggal dunia. Dalam puisi “Cukup Sudah”, Bayu Gautama merespon tindakan yang dilakukan aparat ini.

Bayu Gautama

Cukup Sudah

Ini sajak provokatif

Menghasut rakyat agar berlawanan Melawan penindas berkedok aparat

Anjing-anjing berseragam penjaga korporasi

Cukup sudah !!

Pentungan menghantam tubuh Meremukkan tulang kaki dan tangan Popor senapan menghantam kepala Memecahkan pelipis dan bibir Peluru menembus kulit

Merobek daging dan mengucurkan darah

Cukup sudah

Rakyat dihina lebih dari binatang Tak ada lagi waktu mengutuki nasib Bersatu, bergerak dan melawan Sekarang !!! (Gautama, 2012).

Pada bait terakhir, “*Cukup sudah/ Rakyat dihina lebih dari binatang/ Tak ada lagi waktu mengutuki nasib/ Bersatu, bergerak dan melawan/ Sekarang !!!*” Bayu Gautama menyuarakan semangat perlawanan untuk masyarakat. Sejalan dengan itu, fakta yang terjadi akibat insiden yang menewaskan dua anggota masyarakat, menuai beragam reaksi. Masyarakat secara luas menghimpun massa dalam skala besar, dari berbagai kecamatan. Pemerintah tetap dalam pendirannya dengan berbagai alasan untuk mempertahankan. Hal itu menyebabkan massa melakukan insiden pembakaran kantor Kabupaten Bima pada 26 Januari 2012 dan secara paksa membebaskan puluhan masyarakat yang ditahan, sewaktu aksi di pelabuhan Sape (Tempo, 2012). Pada akhirnya, Bupati mencabut SK 188, sehingga tidak ada lagi pembangunan pertambangan di Kecamatan Lambu.

KESIMPULAN

Pada saat ini, sastra kedaerahan semakin memperlihatkan eksistensinya. Ajip Rosidi pada beberapa waktu lalu, menawarkan sebuah gagasan kedaerahan yang mencoba menempatkan posisi sastrawan diberbagai daerah sebagai bagian penting dalam peta kesusastraan Indonesia. Hal ini, menghasilkan isu daerah sebagai tema yang diangkat dalam karya sastra. Sastra kedaerahan ini, salah satunya dapat dijadikan sebagai upaya dalam pendokumentasian terhadap peristiwa yang terjadi di daerah. Sastra di Bima terkhusus puisi meskipun belum mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Namun, para penulis secara cepat merespon konflik yang terjadi pada akhir 2011–2012 di Bima, melalui sebuah antologi puisi *Bima Membara*. Melalui puisi-puisinya, para penulis secara gamblang menyuarakan dan mengecam atas tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian dan Brimob, menewaskan dua orang massa aksi pada 24 Desember 2011. Pada aksi itu, masyarakat menyuarakan tuntutan, meminta pemerintah mencabut SK 188, terkait perizinan pembangunan tambang di Kecamatan Lambu. Melalui teorinya, Rancière menyebut istilah rezim partisi, di mana hukum dalam praktik police memisahkan mereka-mereka yang dianggap sebagai bagian, dan mereka yang dianggap bukan bagian dari komunitas. Dalam hal ini, masyarakat yang harusnya berada dalam bagian yang tentunya memiliki hak untuk mengetahui adanya pembangunan di daerah mereka, namun dengan mudah disisihkan. Hal ini membuat para penulis menyuarakan, bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Para penulis merespon tindakan masyarakat yang tidak gentar, hingga membakar kantor kabupaten Bima pada 26 Januari 2012. Kejadian-kejadian tersebut, kemudian secara eksplisit dituangkan dalam antologi puisi *Bima Membara*. Guna, mengenang peristiwa sejarah yang terjadi di Bima.

Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi Djoko. (2002). *Sastra dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Devita, Irma. (2012). *Sengketa agraria di Bima yang dipicu oleh SK Bupati Bima*. Diakses 15 Februari 2025 dari *Irma Devita – Info Kenotariatan dan Pertanahan*: <https://irmadevita.com/2012/sengketa-tanah-di-bima-yang-dipicu-oleh-sk-bupati-bima/>.
- Faruk. (2017). *Metode Peneliiian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Hasna, Anwar. (2020). *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaan*. Banguntapan Banul: Bildung.
- Leonowens, SP, dkk. (2012). *Bima Membara*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing Mahayana.
- Maman S. (2016). “Peta Sastra Indonesia Mutakhir”. Jakarta: HISKI Komisariat Universitas Indonesia
- Ratna, Nyoman Kutha. (2015). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Ranciere, J.(2011). *Mute Speech: Lierature, Critical Theory and Poliics*. New York: Columbia Universiy Press.
- Ranciere, J dan Corcoran, S.(2010). *Dissensus on Poliicics and Aesthetics*. London & New York: Colombia Unversity.
- Rancière, Jacques. (2016). *Politik Estetika: Distribusi yang Dapat Ditangkap oleh Indra*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Jalasutra.
- Robert, Robustus. (2011). “Yang-Politis, Yang-Estetis, dan Kesetaraan Radikal: Etika Politik Jacques Ranciere”. Menteng: www.srimulyani.net.
- Tempo. (2012). *Bima rusuh, kantor bupati dibakar*. *Tempo.co – Koran Nusa*. Diakses 23 Juni 2025, dari <https://koran.tempo.co/read/nusa/262721/bima-rusuh-kantor-bupati-dibakar?>
- Wellek, Rene dan Ausin Warren. (2016). *Teori Kesusasraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.